



Jamkesmas Jadi Temuan Audit BPK

PONTIANAK - Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK Rizal Djalil berharap temuan-temuan tersebut dapat diselesaikan sehingga pelaksanaannya tepat sasaran.

"Beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit masih dikenakan biaya tambahan," ujar Rizal dalam pertemuan di BPK RI Perwakilan Pontianak, Senin (30/9).

Rizal menuturkan temuan lainnya yakni pendistribusian kartu peserta hingga akhir tahun tidak terlaksana 100 persen, prosedur pelayanan jamkesmas di rumah sakit belum memadai, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya berperan aktif dalam penyediaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerahnya. Pelaksanaan verifikasi klaim jamkesmas pada rumah sakit dan puskesmas tidak memadai, monitoring dan evaluasi belum secara optimal sesuai pedoman pelaksanaan, serta penetapan peserta jamkesmas tidak sesuai ketentuan sehingga tidak akurat.

"Kami berharap persoalan-persoalan tersebut dapat

◆ Ke Halaman 7 Kolom 1



Jamkesmas Jadi Temuan Audit BPK

Sambungan dari halaman 1

diselesaikan," katanya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan beroperasi secara bertahap pada tahun depan. Sekretaris Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Nursanti Andi mengungkapkan kepesertaan BPJS di Kalbar mencapai 1.343.854 jiwa. Bagi penduduk miskin yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat, dapat diikutsertakan menjadi peserta BPJS oleh pemerintah daerah.

"Kepesertaan BPJS pada 2014 berjumlah 121 juta jiwa, terdiri dari PNS, TNI, Polri, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI)," ujar Nursanti dalam pertemuan di Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Senin (30/9).

Nursanti menjelaskan PBI terdiri atas penduduk miskin atau tidak mampu. Jumlahnya saat ini tercatat 86 juta jiwa dan di Kalbar sebanyak 1.343.854 jiwa. Data tersebut berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jika terdapat data yang tidak sesuai, dapat diinformasikan kepada tim tersebut agar dilakukan perbaikan data.

Menurut Nursanti, PBI ini dibiayai premi oleh pemerintah. Bagi penduduk miskin atau tidak mampu yang tidak termasuk dalam PBI, diharapkan penda dapat membayar preminya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan pelaksanaan BPJS, lanjut Nursanti, pemerintah menyiapkan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif. Upaya yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan berupa penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Penguatan pelayanan kesehatan primer selain penambahan puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan juga melakukan rehabilitasi beberapa puskesmas. Saat ini banyak puskesmas yang tidak berfungsi karena rusak. Pembiayaan pun diarahkan untuk rehabilitasi

puskesmas tersebut. "Untuk daerah terpencil, secara rutin dilakukan kunjungan dokter," katanya.

Pemerintah juga melakukan penguatan kesehatan lanjutan sekunder dan tersier. Upaya ini dilakukan dengan alokasi penambahan tempat tidur kelas tiga. Nursanti menyebutkan secara nasional berlebih. Tetapi di daerah tertinggal termasuk di perbatasan memerlukan tambahan tempat tidur kelas tiga. Penambahan menggunakan anggaran tugas perbantuan.

"Kami banyak mendapatkan keluhan pasien tidak terlayani karena sistem rujukan tidak berjalan dengan baik," katanya.

Pasien dari puskesmas langsung dirujuk ke RSUD provinsi sehingga terjadi kelebihan kapasitas dan rumah sakit di daerah kurang berfungsi. "Kami sedang mengupayakan sistem regionalisasi sistem rujukan. Dalam setiap provinsi, kabupaten, maupun kota dibagi atas beberapa wilayah dan region. Tergantung dari geografisnya. Setiap region ada satu pusat rujukan regional," ujarnya.

Diharapkan sedikitnya dalam tiga atau empat wilayah ada rumah sakit sesuai standar kelas B, dan rumah sakit provinsi memberikan pelayanan sesuai standar kelas A. "Dengan sistem ini rujukan akan berjalan baik," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Andy Jap menuturkan tidak sepenuhnya pelaksanaan jamkesmas di wilayahnya bermasalah. "Terlepas dari yang bermasalah, yang tidak bermasalah juga banyak. Banyak yang tepat sasaran," ujar Andy, kemarin. Ia menuturkan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk merevisi data jamkesmas yang dianggap tidak tepat, termasuk di Kalbar. Waktu yang diberikan untuk perbaikan hingga akhir September tahun ini. Di Kalbar, pemerintah kabupaten dan kota telah mengirimkan revisinya. "Salah satunya Singkawang, banyak melakukan revisi. Hingga Juli

kemarin, dari 1,3 juta jiwa untuk Kalbar, revisinya tidak sampai lima persen," katanya.

Proyek Rumah Khusus

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, Sukiman meminta, Badan Pemeriksaan Keuangan RI secepatnya melakukan audit investigasi terhadap proyek Perumahan Khusus di Kalbar yang ditenggari banyak tidak tuntas.

"Kalau sifatnya memang terjadi unsur kerugian negara sebaiknya diselesaikan keranah hukum. Kita dukung langkah BPK RI melakukan audit cepat buat mengetahui Proyek Rumah Khusus tahun 2012 tersebut," ungkapnya Selasa (1/10) via telepon dari Jakarta.

Sukiman yang tengah berbidang di Gedung Senayan DPR RI meminta harus ada langkah tegas terkait proyek-proyek APBN di daerah seperti di Kalimantan Barat. Sebab, kalau pekerjaan di Kalbar kurang beres, tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah lain. Apalagi kalau nantinya hasil audit jelas merugikan keuangan negara termasuk warga daerah setempat.

Hanya saja, lanjut politisi PAN Kalbar ini, harus juga ada langkah pencegahan. Misalnya pihak pelaksana dan pemberi proyek diberikan warning keras. Namun kalau tidak ada itikad baik memang sebaiknya diimpahkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi sekalian.

Sebelumnya DPP LAKI melaporkan Pembangunan Proyek Rumah Khusus di Provinsi Kalbar yang ditenggari banyak tidak tuntas. Nilai proyeknya mencapai Rp30 miliar dari APBN tahun 2012. Peruntukannya direncanakan buat para abdi negara seperti polisi, guru, tentara, dan lain-lain yang bertugas di daerah pedalaman, perbatasan atau perhuluan.

"Kami senagja datang ke Kejati Kalbar untuk melaporkan Proyek Perumahan Khusus Kalbar program Kementerian Perumahan Rakyat RI senilai

Rp30 miliar tersebut," kata Burhanudin Abdullah, Ketua Umum DPP LAKI Kalimantan Barat, kemarin di Aula Kejati Kalbar.

Pembangunan Proyek Rumah Khusus dari Kementerian Perumahan Rakyat letaknya tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Diantaranya di Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang dengan nilai proyek Rp6,78 miliar. Kabarnya bangunan perumahannya tidak tuntas semua dikerjakan. Akan tetapi proses pencairan sudah selesai tahun 2012 lalu. "Ada bukti dan foto-fotonya yang diambil tim saya," katanya.

Bukan hanya di Jagoibabang Proyek Perumahan Khusus ditenggari tidak tuntas dikerjakan. Di wilayah lainnya seperti di Kabupaten Sintang tepatnya di daerah Ketungau Hulu dengan pagu dana Rp3,3 miliar dan Ketungau Tengah Rp2,5 miliar sepertinya kurang sesuai harapan.

Lalu, lanjutnya, di Kabupaten Sambas di wilayah Sajingan dengan nilai Rp3,5 miliar juga diprotes masyarakat. Ada juga di Kabupaten Bengkayang di wilayah Siding dengan nilai Rp3,4 miliar, kabupaten Kapuas Hulu di wilayah Batang Lupar, Embaloh Hulu, dan Putusibau Selatan dengan nilai Rp4,9 miliar. "Terakhir di Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah Badau dan Puring Kencana dengan nilai dana Rp5,3 miliar," terangnya.

Sukiman meminta seandainya proyek tersebut tidak sesuai bestek, sebaiknya ada pihak yang bertanggung jawab. Dia berharap Kementerian Perumahan Rakyat dan kontraktor pelaksana menjelaskan kenapa bisa demikian. Itu karena mendapatkan dana pusat masuk ke Kalbar tidaklah mudah. Prosesnya berbelit juga panjang. "Dan kalau pekerjaannya tidak sesuai harapan sudah ada lembaga resmi untuk menindaklanjuti. Aparat penegak hukum juga tidak boleh tinggal diam," tutur anggota DPR RI yang duduk di Badan Anggaran ini. *(uni/den)*